

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Periode 2018-2022

Penulis:
Anggia Septie Ayu
Lestari¹
Nugraeni²

Afiliasi:
Universitas Mercu
Buana Yogyakarta

Korespondensi:
anggiaseptie09@email.
com¹
nugraeni@mercubuana
-yogya.ac.id²

Histori Naskah:
Submit: 12-06-2024
Accepted: 30-06-2024
Published: 01-07-2024

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sleman dilihat dari : (1) rasio kemandirian keuangan daerah pola hubungannya tergolong dalam hubungan instruktif karena rata-rata rasionya 71,67%. (2) rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan tingkat ketergantungan rendah karena dibawah 50%. (3) rasio efektivitas pendapatan asli daerah tergolong cukup efektif dengan rata-rata rasio sebesar 108%. (4) rasio desentralisasi fiksak selama 5 tahun mengalami bervariasi naik turun setiap tahunnya hasil rasio desentralisasi masih dibawah 50%. (5) rasio efisiensi pendapatan asli daerah tergolong efisien dengan rata-rata 62%. Penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama periode sebelum dan selama pandemi COVID-19 (2018-2022) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kemandirian keuangan daerah pada kategori sangat baik, ketergantungan keuangan daerah pada kategori tinggi, efektivitas pendapatan asli daerah pada kategori efektif, desentralisasi fiskal kategori sedang, dan efisiensi pendapatan asli daerah pada kotegori sangat efisien.

Kata kunci: kinerja keuangan, rasio keuangan

Pendahuluan

Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang langsung ataupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan yang lebih luas dari Pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan semua urusan Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan dan mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua daerahnya.

Menurut Kasmir (2019) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja dan tindakan yang dicapai dengan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga, yang dapat berupa realisasi pendapatan dan beban yang disusun secara akrual, sehingga

menghasilkan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan atau lembaga kesimpulan keberhasilan manajemen.

Pengukuran kinerja keuangan penting untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan disajikan dalam bentuk laporan yang bertujuan untuk memberikan informasi keuangan tentang status keuangan dan pencapaian anggaran, serta kinerja keuangan daerah untuk membantu pengambilan keputusan. Menunjukkan tanggung jawab untuk melaporkan sumber daya pengelolaan pemerintah. Penilaian kinerja ini berupa analisis rasio keuangan yang diturunkan dari unsur laporan pertanggungjawaban kepala Daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang mengemban tugas mengatur, mengembangkan, dan melayani masyarakat wajib menyampaikan atau melaporkan sistem pertanggungjawaban daerahnya untuk melihat dan menilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan daerah dengan baik. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu daerah adalah analisis rasio. Karena yang diteliti termasuk dalam sektor publik maka rasio yang digunakan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efisiensi pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah yang dipilih untuk diteliti adalah kabupaten sleman, karena kabupaten sleman terkenal dengan masyarakatnya yang selalu taat dalam pembayaran pajak, seperti pajak pembangunan. Selain itu kabupaten sleman juga terkenal banyak potensi-potensi sumber daya yang meliputi, pertanian, industri, wisata, dan infestasi

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Khasanah (2022) dengan judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman periode tahun 2020-2021. Dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam pengelolaan sumber dayanya selama tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan publikasi pemerintah kabupaten sleman yang dikumpulkan dengan studi pustaka. Data diolah dengan analisis laporan keuangan menggunakan alat rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan kemampuan membayar kembali pinjaman.

Wulan Dri Puspita dan Dyah Ani Pangastuti (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu sebelum dan saat pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja sebelum dan saat pandemi Covid-19 menggunakan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian belanja dan rasio ekonomi. Metode kuantitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Batu pada tahun 2019-2020.

Studi Literatur

Kinerja

Menurut Kasmir (2019) menyatakan bahwa kinerja ialah hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam pemenuhan tugas dan tanggungjawab yang diberikan selama periode. Kinerja adalah hasil kerja yang dilakukan oleh individu atau pegawai menghasilkan output, efisien dari segi kualitas dan kuantitas. Kinerja menjadi masalah utama dalam sebuah organisasi atau lembaga instansi, kinerja yang memuaskan dari karyawan tidak begitu saja terjadi dengan sendirinya melainkan melalui sebuah proses dan dibutuhkan evaluasi secara berkelanjutan.

Kinerja juga merupakan penilaian atasan dalam penilaian kemampuan bawahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat digunakan untuk menilai perilaku individu selama eksekusi tugas atau tindakan tanggungjawab untuk tugas yang diberikan.

Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan bisnis akrual. Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan atau keuangan sebuah instansi yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Derise (2018) Laporan Kinerja Keuangan merupakan realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi serta surplus atau defisit. Karena itu, penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk penentuan efektivitas operasional, organisasi, dan pegawai berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran yang menggunakan indikator keuangan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan baik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan meningkatkan prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa performance keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian hasil pekerjaan di lapangan keuangan daerah, termasuk anggaran dan realisasi anggaran menggunakan indikator keuangan yang ditentukan melalui kebijakan atau peraturan perundang-undangan selama periode anggaran.

Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan, dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan pemerintah. Rasio ini seringkali digunakan oleh pemerintah untuk memutuskan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah tersebut, terhadap penyelamatan aset pemerintah sehingga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan.

Analisis Rasio keuangan adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek kinerja operasi dan keuangan perusahaan berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan seperti laporan neraca (*balance sheet*), laporan aliran kas (*cash flow statement*) dan laporan laba-rugi (*income statement*). Rasio keuangan ini dapat digunakan oleh pemerintah, kreditur atau pemberi pinjaman serta investor dan para pemegang saham. Rasio keuangan ini juga digunakan oleh para analisis sekuritas dan lembaga pemeringkat kredit untuk menilai kekuatan dan kelemahan berbagai pemerintah yang akan dianalisisnya.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah teknik analisis penggabungan antara satu unsur lainnya dalam laporan keuangan, yang dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana dalam periode atau kurun waktu tertentu. Dengan cara membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar neraca maupun laba rugi ataupun hasil-hasil usaha dan suatu perusahaan pada periode tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisi keuangan suatu perusahaan.

Jenis-jenis Rasio Keuangan Daerah

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kemampuan keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah, Kabupaten, Kota, atau Provinsi adalah :

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi Rasio Kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstren (terutama pemerintah pusat atau provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin tinggi pasrtisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2017) semakin tinggi rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/ atau pemerintah propinsi.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Setiap pemerintah sudah memiliki estimasi Pendapatan Asli Daerah yang tentunya disusun berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah. Tidak tertutup kemungkinan dalam realisasinya, Pendapatan Asli Daerah lebih besar atau lebih kecil dari yang sudah diestimasikan.

Rasio Desentralisasi Fiskal

Menurut Mahmudi (2017) rasio desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi konstrubusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapau kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangring informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi secara tidak langsung dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Berikut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bkad.slemankab.go.id/laporan-realisasi-anggaran/&ved=2ahUKEwjJp9rT6tP_AhUmR2wGHQAOCrsQFnoECBQQAQ&usq=AOvVaw0TqPRCMhGavnKRIZkBsFYW

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang akan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 1 Penghitungan Rasio Kemandirian keuangan daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer pusat dan pinjaman	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2018	894.272.961.557.85	1.368.717.993.794.00	65,33%
2019	972.049.575.206.45	1.371.364.974.325.00	70,88%
2020	788.246.742.427.73	1.271.979.511.950.00	61,97%
2021	803.679.358.719.08	1.366.608.643.179.00	58,80%
2022	1.411.087.776.251.00	139.140.652.000.00	101,41%
RATA-RATA			71,67%

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2023)

Penghitungan rasio kemandirian keuangan daerah didasarkan pada perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total dana transfer yang mencakup bantuan penerimaan pusat.

Hasil menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman sebelum pandemi pada tahun 2018 yaitu 65,33% dan pada tahun 2019 yaitu 70,88% atau dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu menjalankan otonomi daerah, dan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang. Otonomi daerah yang dimaksud yaitu menentukan dan menetapkan UMR, dan mengelola sendiri Anggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sleman di tahun 2020 (di masa pandemi covid-19 periode pertama) mengalami penurunan yaitu 61,97%, ditahun 2021 (masa pandemi periode kedua) menurun menjadi 58,80% yang dikategorikan baik dan dalam pola hubungan instruktif. Hal ini dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dan daerah tidak bisa

melaksanakan otonomi daerah, seperti menentukan UMR, mengelola sendiri anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2022 (masa pandemi covid-19 periode ketiga) mengalami kenaikan 101,41% yang dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif yang berarti bahwa pemerintah daerah dinilai lebih mampu menjalankan otonomi daerah.

Menurut hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah sebelum pandemi dan pada saat pandemi covid-19 pemerintah Kabupaten Sleman memiliki rata-rata kemandiriannya tergolong sangat baik. Rasio kemandirian yang sangat baik menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

**Tabel 2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman**

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Penerimaan	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
2018	1.736.316.213.265.36	417.658.961.346.00	41,57%
2019	1.788.227.110.597.00	403.042.566.398.15	44,36%
2020	1.617.144.005.540.00	398.584.982.878.78	40,57%
2021	1.968.377.573.366.50	380.545.812.168.92	52,19%
2022	1.938.607.492.467.44	445.465.298.263.96	43,51%
RATA-RATA			44%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2023)

Hasil penghitungan Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2018 sedikit berkurang mengalami penurunan ketergantungan dana pusat terutama lebih ke pembayaran gaji PNS terlihat dari perhitungan rasio ketergantungan daerah yaitu 41,57% untuk tahun selanjutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mencapai 43,51%. Dapat dikategorikan tingkat ketergantungan rendah karena dibawah 50%

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas
2018	894.272.961.557.85	821.071.767.742.63	108,91%
2019	972.049.575.206.45	903.278.920.723.56	107,61%
2020	788.246.742.427.73	676.743.940.021.93	116,47%
2021	803.679.358.719.08	770.675.023.451.00	104,28%
2022	1.411.087.776.251.00	1.031.150.840.396.00	102,90%
RATA-RATA			108%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah (2023)

Hasil penghitungan Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2018 yaitu 108,91% dan dikategorikan efektif karena rata-rata efektivitasnya berada pada presentase 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame mencapai target dari yang dianggarkan sebelumnya.

Hasil Efektivitas PAD tahun 2019 yaitu 107,61% dikategorikan efektif, untuk tahun berikutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mencapai 102,90%. Dapat dikategorikan efektif

yang berarti penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu mencapai anggaran yang telah direncanakan.

Rasio Desentralisasi Fiskal

**Tabel 4 Rasio Desentralisasi Fiskal
Pemerintah Kabupaten Sleman**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Penerimaan Daerah	Rasio Desentralisasi Fiskal
2018	894.272.961.557.85	417.658.961.346.00	18,96%
2019	972.049.575.206.45	403.042.566.398.15	24,11%
2020	788.246.742.427.73	398.584.982.878.78	19,77%
2021	803.679.358.719.08	380.545.812.168.92	21,11%
2022	1.411.087.776.251.00	445.465.298.263.96	31,67%
RATA-RATA			23,12%

Sumber Data : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (2023)

Hasil perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten Sleman di tahun 2018 yaitu 18,96% dan selama 5 tahun mengalami bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mengalami kenaikan 31,67%. Meskipun setiap tahun terjadi kenaikan hasil presentase rasio desentralisasi fiskal. Hasil rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Sleman masih dibawah 50%. Sehingga Kabupaten Sleman belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 5 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Sleman**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Penerimaan Daerah	Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
2018	2.298.131.055.803.06	417.658.961.346.00	55%
2019	2.437.844.182.430.33	403.042.566.398.15	60%
2020	2.333.597.553.062.59	398.584.982.878.78	58%
2021	2.714.312.898.539.54	380.545.812.168.92	71%
2022	3.040.474.126.755.75	445.465.298.263.96	68%
RATA-RATA			62%

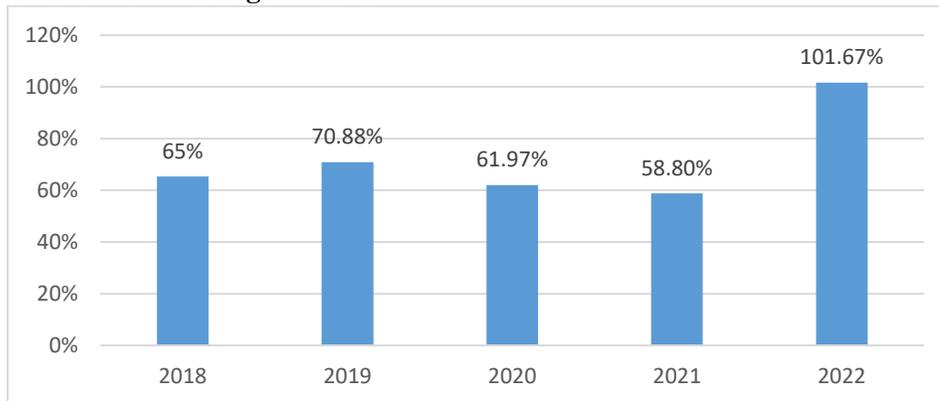
Sumber Data : Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (2023)

Hasil penghitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sleman di tahun 2018 yaitu 55% dan berada pada kategori Efisien, hal tersebut menggambarkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman efisien dalam menekankan biaya yang dikeluarkan untuk mengoptimalkan perolehan PAD.

Hasil penghitungan Rasio efisiensi PAD di tahun 2019-2022 juga berada dikategori yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu efisiensi karena nilai presentase yang dihasilkan kurang dari 100%, dan menggambarkan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Sleman efisien dalam mengelola pengeluaran daerah yaitu belanja daerah seperti belanja barang dan jasa, pembelian investor kantor, biaya pendidikan, dan biaya perjalanan dinas bagi kegiatan pegawai.

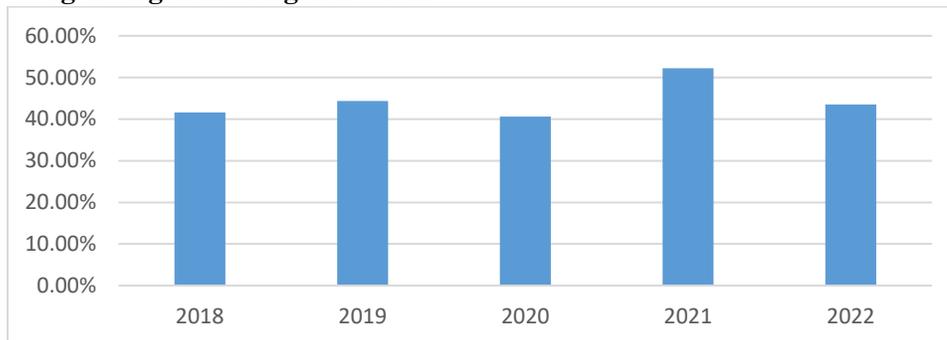
Pembahasan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



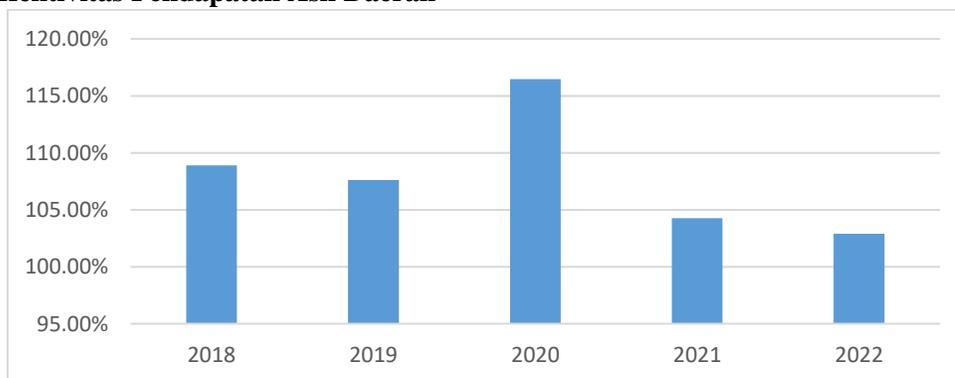
Berdasarkan grafik di atas menunjukkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sleman, di tahun 2018-2021 bervariasi naik turun setiap tahunnya, sampai tahun 2022

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah



Berdasarkan grafik diatas menunjukkan hasil penghitungan ketergantungan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 41,57% untuk tahun selanjutnya bervariasi naik turun setiap tahunnya sampai tahun 2022 mencapai 43,51%.

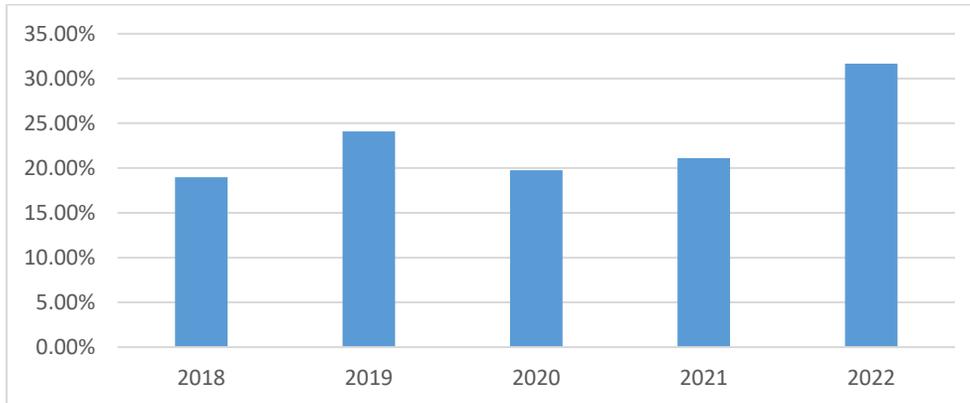
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2018 sebesar 108,91% mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 107,61% dan di periode selanjutnya

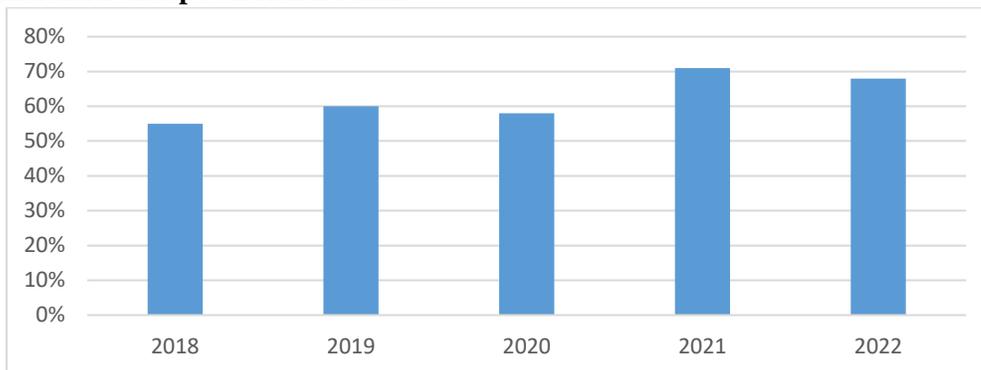
mengalami penurunan menjadi 116,47% kemudian 2021-2022 mengalami peningkatan yaitu 2021 104,28% dan 2022 102,90%.

Rasio Desentralisasi Fiskal



Hasil dari penghitungan yang dapat menggunakan rasio desentralisasi fiskal dilihat dari grafik diatas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2018 yaitu 18,96% dan mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu 24,11%, di tahun 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 19,77%, dan mengalami peningkatan di tahun 2021-2022 yaitu 2021 sebesar 21,11% dan tahun 2022 31,67%.

Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah



Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa dari tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan yaitu 2018 sebesar 55% dan 2020 60% dimana terdapat belanja pegawai, barang dan jasa, peralatan, gedung, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 58% dan di tahun 2021 71%, tahun 2022 68%.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman selama sebelum dan saat pandemi covid-19 (tahun 2018-2022) jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada kategori Sangat Baik.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada kategori Tinggi.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada kategori Efektif.
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal pada kategori Sedang.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman jika dilihat dari Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada kategori Sangat Efisien.

Referensi

- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio ketergantungan fiskal terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014-2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(Spesial Issue 3), 1170-1181.
- Febriani, A. N., Buchdadi, A. D., & Siregar, M. E. S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Sebelum dan Di Saat Pandemi Covid-19. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 149-164.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38.
- Helmawanti, N., Yusri, Y., Rezeki, Y., & Yanti, S. (2023). Analisis Implementasi SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BUMDes Batu Batuah Desa Batu Tojah Kecamatan Barito Tuhup Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 629-639.
- Nugraeni, N., Paramitalaksmi, R., & Wafa, Z. (2022). Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Naskah PUBLIKASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI*.
- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan kesebelas. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Revisi. Jkarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lakonawa, W., & Nugraeni, N. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Economic Value Added (EVA) Pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Tahun 2018-2022. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* , 2 (1), 260-272.
- Nauw, E. T., & Riharjo, I. B. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(6).
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
- Putra, I. G. S., Affandi, H. A. A., Purnamasari, L., & Sunarsi, D. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Cipta Media Nusantara.
- Ramadhan, A., Sam, I., & Olimsar, F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2021. *Journal of Student Research*, 1(4), 104-118.

Santoso, R. T., Syukri, M., & Hasanah, N. M. (2021). ANALISIS PENILAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 75-94.

Sirait, P. (2021). Pelaporan dan laporan keuangan.

Thian, A. (2022). *Analisis laporan keuangan*. Penerbit Andi.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repositori IMWI*, 3(1), 61-74.

Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. (2023). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 978-988.